



ARAH KEBIJAKAN MONETER BAGI PEMERINTAHAN BARU

Sahat Aditua Fandhitya Silalahi*)

Abstrak

Pemerintahan baru yang akan menjabat menghadapi tantangan ekonomi, yang berbeda sebagai dampak dari globalisasi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kondisi perekonomian nasional beserta kendala yang belum terselesaikan oleh pemerintahan yang telah lalu menjadi sangat penting. Dari sisi kebijakan moneter terdapat dua kebijakan utama yang dapat direkomendasikan bagi pemerintahan yang akan datang, yaitu menjaga stabilitas inflasi, nilai tukar rupiah, dan meneruskan usaha dalam memperdalam pasar keuangan.

Pendahuluan

Presiden terpilih sebagai hasil pemilihan umum tanggal 9 Juli 2014 akan menghadapi tantangan dalam bidang perekonomian yang diwarnai dengan persaingan global dan liberalisasi perdagangan. Tentu bukan hal mudah untuk mengelola aspek ekonomi terutama kesejahteraan bagi lebih dari 240 juta jiwa yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Berangkat dari kondisi ini maka dibutuhkan optimalisasi sumberdaya yang ada beserta instrumen kebijakan yang tersedia untuk mampu bersaing dalam perekonomian global.

Satu hal yang pasti adalah presiden beserta kabinet mendatang akan mewarisi kondisi perekonomian pasca pemerintahan periode yang telah lalu. Tercatat, kebijakan moneter yang diambil oleh Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

selama 10 tahun masa pemerintahannya telah berhasil membawa kestabilan ekonomi walaupun secara rata-rata target pertumbuhan belum tercapai (menurut data Bank Indonesia, selama tahun 2007-2012 rata-rata realisasi pertumbuhan 5,4 persen pertahun, masih di bawah target tahunan sebesar 6,1 persen).

Secara makro, terdapat 2 instrumen kebijakan ekonomi, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter terkait dengan pengaturan tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) dalam rangka mengendalikan tingkat inflasi. Sedangkan kebijakan fiskal merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan dalam rangka menggunakan anggaran sehingga dapat menstimulus pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan. Kedua

*) Peneliti Kebijakan Publik pada Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik di Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi, Setjen DPR RI, E-mail: sahatzilalahi81@gmail.com.



instrumen inilah yang harus dioptimalkan oleh Pemerintah dalam rangka mencapai pertumbuhan dan kestabilan ekonomi.

Berbicara mengenai persaingan dalam ekonomi global yang akan dihadapi oleh pemerintahan yang akan datang, satu hal yang harus memperoleh perhatian adalah adanya saling keterkaitan (*interlinkage*) antara ekonomi satu negara dengan negara lain. Tingkat suku bunga dan nilai tukar mata uang secara tradisional merupakan daya tarik utama arus investasi dari suatu negara ke negara lain. Disinilah kebijakan moneter memegang peran penting dalam menstabilkan inflasi dan nilai tukar mata uang, sekaligus mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

Tantangan Perekonomian Nasional

Menurut Harris (2011), Indonesia adalah negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kelima di Asia. Berkat serangkaian kebijakan reformasi ekonomi yang konsisten, maka dapat dicapai peningkatan kinerja birokrasi dan perbaikan signifikan pada dimensi sosial dan dimensi pendidikan terutama pasca krisis finansial tahun 1998.

Kinerja ekonomi makro yang kuat merupakan dampak dari keberhasilan pengelolaan kebijakan dan reformasi substansial yang mulai dicanangkan oleh pemerintah pasca krisis Asia dan turut memberikan andil besar dalam memperkuat kerangka ekonomi makro dan juga meliberalisasikan rezim perdagangan internasional. Selain itu, investasi besar pada sektor industri berhasil mendorong dihasilkannya *output* potensial. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memanfaatkan momentum tersebut dengan memberlakukan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang mengintegrasikan komponen output potensial yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara.

Lepas dari keberhasilan kebijakan ekonomi pasca krisis Asia tersebut di atas, harus diakui bahwa perekonomian domestik sesungguhnya masih jauh dari kualitas pertumbuhan yang berkesinambungan. Pemerintah sendiri mencantumkan angka 7-9 persen pertahun sebagai tingkat pertumbuhan yang dapat mencapai tujuan pembangunan ekonomi, yaitu menjadi salah satu dari 10 kekuatan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2025. Angka ini merupakan target yang ambisius, mengingat *World Bank* (2012)

menyatakan dalam laporannya bahwa rata-rata target pertumbuhan ekonomi secara internasional hanya sebesar 5,5 persen.

Secara umum, pembangunan kelembagaan merupakan prasyarat yang harus dipenuhi Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan yang ambisius. Apalagi lansekap persaingan industri akan berubah total setelah pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015. Perlu diperhatikan pada saat pemberlakuan MEA persaingan akan menjurus kepada efisiensi penggunaan input sehingga peran kelembagaan menjadi penting dalam mengolah input tersebut.

Implikasi dari efisiensi adalah munculnya tantangan bagi perekonomian Indonesia untuk meningkatkan produktivitas pada sektor industri, karena mau tidak mau produktivitas menjadi kata kunci keunggulan persaingan di tengah efisiensi produksi dan upah buruh dalam skala massal. Tantangan penting lainnya adalah meningkatkan kesinambungan dari pembangunan ekonomi itu sendiri, dalam konteks kemampuan dari pertumbuhan dalam meningkatkan kesejahteraan. Harus diakui bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia belum mampu memberikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu indikasinya adalah nilai rasio GINI yang terus bertambah dari tahun 2010 sebesar 0,3 menjadi 0,45 pada tahun 2013.

Ketahanan Ekonomi Indonesia

Pada tahun 2013 yang lalu, Indonesia memperoleh berita positif dengan meningkatnya ranking kredit hutang luar negeri oleh 2 lembaga peringkat internasional. Dasar kenaikan peringkat tersebut adalah pertumbuhan permintaan domestik yang kokoh yang telah berhasil melindungi perekonomian dari kemunduran sebagaimana dihadapi oleh negara lain di berbagai belahan dunia. Bahkan siklus resesi perekonomian global yang ditandai oleh krisis *subprime mortgage* tahun 2007-2008 dapat diminimalisir oleh pemerintah. Berkaitan dengan hal ini, Taklim (2011) menegaskan bahwa prestasi inilah yang membedakan perekonomian Indonesia dibandingkan dengan negara ekonomi berkembang lainnya.

Bila melihat jauh ke belakang, adopsi target inflasi dan kerangka fiskal berbasis peraturan yang pruden sejak pertengahan

tahun 1990-an ikut memberikan kontribusi kepada stabilitas ekonomi. Selain itu, meski tarif ekspor-impor internasional mengalami penurunan secara signifikan sejak krisis Asia, namun perekonomian regional yang masih bertumpu pada perdagangan internasional menunjukkan ketahanannya. Hal inilah yang memberikan keuntungan bagi perekonomian Indonesia. Karena tidak terlalu bertumpu pada perdagangan di tingkat regional, maka Indonesia dapat membagi resiko pada saat terjadinya krisis di wilayah Uni Eropa pada tahun 2010.

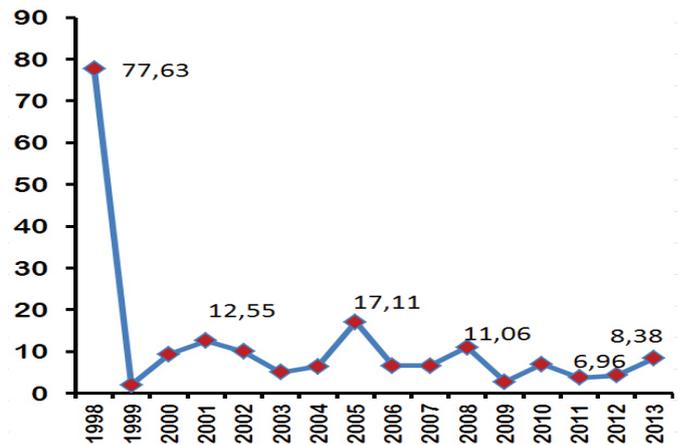
Melihat kondisi di atas, hal yang perlu diwaspadai oleh pemerintahan yang akan datang adalah resiko jangka pendek yang berasal dari aspek eksternal. Meningkatnya resiko global yang umumnya terjadi sebagai imbas dari krisis Eropa akan membalikkan aliran modal yang masuk selama beberapa tahun terakhir. Potensi bahaya ada pada kondisi keuangan pemerintah, khususnya menipisnya cadangan devisa serta ancaman terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Namun ada berita positif sebagai hasil dari diperolehnya peringkat *investment grade*. Pemerintah dalam hal ini berkesempatan untuk membuka lebih banyak investasi yang terbatas pada aset-aset *investment grade*. Selain itu, besar kemungkinan Indonesia akan relatif terlindung dari perlambatan perdagangan global, kecuali apabila perekonomian dan harga komoditas di Negara Asia lainnya juga terimbas secara signifikan.

Arah Kebijakan Moneter Pemerintahan Baru

Sebagaimana dijelaskan di bagian awal tulisan, kerangka umum makro ekonomi dan keuangan Indonesia telah meningkat secara signifikan selama beberapa tahun terakhir. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, terdapat penurunan tingkat inflasi pada saat krisis moneter tahun 1998 yaitu sebesar 77,63 persen menjadi 8,38 persen pada tahun 2013. Perkembangan inflasi dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada **Gambar 1** berikut ini.

Dari sisi kerangka kebijakan moneter, penggabungan target inflasi dengan nilai pertukaran uang yang stabil namun tetap fleksibel harus menjadi target utama. Namun, instrumen lain harus diikutsertakan dalam menopang alat kebijakan yang dimiliki oleh BI.



Gambar 1. Perkembangan Inflasi 1998-2013

Sumber : Badan Pusat Statistik, "Data Inflasi Tahunan Indonesia 1998-2011".

Dalam kasus semakin meningkatnya intensitas persaingan global, yang tentunya diiringi dengan ketidakpastian internasional, strategi komunikasi BI seharusnya difokuskan pada pencapaian target inflasi dan pengurangan volatilitas nilai tukar mata uang. Hargo (2013) menekankan bahwa investor dan pelaku usaha dalam negeri selalu menginginkan kepastian akan nilai tukar rupiah yang relatif stabil.

BI juga secara kontinyu berupaya untuk memperdalam pasar nilai tukar mata uang dengan menyuplai deposito berjangka berupa dolar AS. Selain bertujuan untuk mengelola likuiditas, tujuan lainnya adalah untuk memiliki sumber daya bagi aturan makro prudensial dalam menjamin stabilitas keuangan. Rasio maksimum *loan to value* untuk kredit properti dan uang muka minimum kredit kendaraan juga sudah ditetapkan.

Dari sisi kedalaman pasar keuangan, boleh dikatakan pasar keuangan nasional masih tetap dangkal (definisi atau penjelasannya). Salah satu penyebab utama tidak bertambahnya kedalaman pasar keuangan nasional adalah kurangnya instrumen investasi yang tersedia bagi investor retail.

Dalam rangka mengatasi hal tersebut, BI telah menyediakan instrumen keuangan yang lebih luas dan mendorong perbankan untuk melakukan lebih banyak transaksi di pasar dalam skala besar. Namun boleh dikatakan beberapa segmen pasar keuangan, seperti modal ventura dan keuangan mikro tetap belum mengalami kemajuan yang signifikan.

Permasalahan dengan perusahaan modal ventura adalah ketiadaan modal yang dimiliki oleh pemilik tunggal. Pada Bulan Februari 2012, Menteri Keuangan telah menerbitkan peraturan guna mendorong penyedia modal ventura agar fokus pada perusahaan yang tidak memiliki akses ke pinjaman bank. Pemerintah juga telah menjamin pengecualian pajak bagi perusahaan modal ventura untuk beberapa investasi yang dilakukan pada sektor tertentu.

Sedangkan untuk sektor keuangan mikro, seperti kebanyakan negara berkembang, sektor ini telah mengalami perkembangan pesat. Proporsi terbesar sektor keuangan mikro bergerak di sektor formal sebagai bagian dari bank komersial. Namun banyak juga penyedia keuangan mikro yang bergerak di sektor informal sebab mereka memiliki insentif yang kuat untuk beroperasi pada segmen yang lebih luas.

Penutup

Arah kebijakan moneter yang harus memperoleh perhatian pemerintahan yang akan datang meliputi kebijakan penurunan inflasi dan menjaga kestabilan nilai tukar rupiah pada nilai keseimbangannya tanpa mengalami volatilitas yang tinggi. Secara umum, strategi mempertahankan cadangan devisa akan memegang peran penting disini.

Sedangkan arah kebijakan kedua adalah meneruskan usaha dalam memperdalam pasar keuangan, khususnya bagi segmen yang masih bermasalah, yaitu pelaku usaha dengan modal ventura dan pelaku usaha keuangan mikro. Untuk penyedia modal ventura, pemerintah dapat menekankan kembali fokus usaha penyaluran dana bagi perusahaan yang tidak memiliki akses perbankan. Seiring dengan berjalannya waktu, ketahanan perusahaan modal ventura ini akan teruji sehingga instrumen investasi dapat secara masif ditujukan kepada segmen tersebut.

Sedangkan usaha pendalaman pasar keuangan bagi lembaga keuangan mikro masih terbentur dalam status kelembagaan, khususnya bagi mereka yang bergerak di sektor informal. Oleh karena itu penguatan kelembagaan baik dalam bentuk *avalis* atau koperasi dapat dijadikan alternatif kebijakan.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus turut mengawal kebijakan moneter

pemerintahan yang akan datang melalui ketiga fungsinya, yaitu legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Untuk fungsi legislasi, bukan tidak mungkin kebijakan cadangan devisa dapat diatur pada instrumen perundang-undangan setingkat undang-undang. Salah satu alternatifnya adalah memberikan norma pada revisi UU Perbankan yang prosesnya saat ini masih berjalan.

Sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dapat dijadikan momentum untuk memberikan norma pengaturan yang menyangkut tentang kebijakan pendalaman pasar keuangan di dalam penyusunan UU Perkoperasian yang baru. Norma pengaturan dapat diarahkan untuk mendorong koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam agar dapat mengarahkan kegiatannya kepada investasi dengan skala kecil dan resiko minimal.

Referensi

- Bank Indonesia, 2013, "Laporan Kinerja Ekonomi 2012".
- Badan Pusat Statistik, "Data Inflasi Tahunan Indonesia 1998-2011".
- Hargo Utomo, "Analisis Pergerakan Saham Sektoral Pasca Pengumuman Investment Grade", Jurnal Manajemen UGM, Vol. 1 (2), 2013, Hal. 45-61.
- Harris Hariman, "Pertumbuhan Ekonomi dengan Model Strauss Belladic (Study Tahun 2001-2010)", Jurnal Kebijakan Ekonomi, Vol. 2 (1), 2011, Hal. 11-32.
- Taklim Akbar, "Struktur Perekonomian Indonesia dan Elastisitas dalam Krisis Finansial 2007-2008", Jurnal Manajemen UGM, Vol. 2 (1), 2011, Hal. 32-57.
- <https://id.berita.yahoo.com/budi-mulya-kebijakan-bi-berdasarkan-perppu-171727145.html>, diakses tanggal 7 Agustus 2014.
- World Bank, "Country Report Nomor 1123: Establishing Good Governance Towards Liberalization", 2012, Official Country Report.